



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta disusun bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program serta kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga apa yang dikerjakan akan tepat sasaran dan akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwakarta, 10 Agustus 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA



YUS DJUNAEDI KUSLI.S.STP.,M.Si
NIP. 1970021998101001

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	7
BAB V : Penutup	8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dan era desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlepas dengan Peraturan dan perundangan, untuk itu kita harus kembali menata sistem, prosedur, dan proses-proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Guna menunjang tujuan utama Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya maka perlu kiranya di tindak lanjuti dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjabarkan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan, serta merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah dan Pemerintahan yang tentram, tertib dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai cerminan realisasi tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya, salah satu

langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;

21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta menyelaraskan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta terdiri dari 6 (Enam) Program dengan Kegiatan dan Subkegiatan sebagai berikut : *(Tabel terlampir).*

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Purwakarta	100	46,498,600	Purwakarta	53,03%	24,656,200	21,841,800	46,97%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	100	29,998,600	Purwakarta	51,30%	15,390,200	14,608,400	48,70%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Purwakarta	100	129,763,897	Purwakarta	53,22%	69,064,950	60,698,947	46,78%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Purwakarta	100	100,000,000	Purwakarta	49,32%	49,323,500	50,676,500	50,68%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta	100	43,509,000	Purwakarta	35,49%	15,442,300	28,066,700	64,51%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	100	119,885,000	Purwakarta	13,56%	16,251,712	103,633,288	86,44%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	100	50,000,000	Purwakarta	0,0%	-	50,000,000	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	100	329,426,700	Purwakarta	99,88%	329,031,000	3,995,700	0,12%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Purwakarta	100	20,000,000	Purwakarta	27,50%	5,500,000	14,500,000	72,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Purwakarta	100	64,519,100	Purwakarta	35,79%	23,091,864	41,427,236	64,21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang	Purwakarta	100	642,698,664	Purwakarta	42,35%	272,179,150	370,519,514	57,65%
Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Purwakarta	100	26,900,000	Purwakarta	55,46%	14,919,315	11,980,685	44,54%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Purwakarta	100	49,966,000	Purwakarta	0,0%	-	49,966,000	100,00%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	100	30,040,000	Purwakarta	41,71%	12,530,000	17,510,000	58,29%

	<p>Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</p>	<p>Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>100</p>	<p>99,511,000</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>0.0%</p>
	<p>Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>100</p>	<p>530,997,200</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>187,880,000</p>	<p>343,117,200</p>
	<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>100</p>	<p>495,789,500</p>	<p>Purwakarta</p>	<p>309,306,300</p>	<p>186,483,200</p>



BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun 5 Tahun kedepan adalah **MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.** Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern, dengan strategi ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi. Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terdiri atas 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar **Rp. 11.293.432.231,-** (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), namun dengan adanya perubahan anggaran maka pagu indikatif program dan kegiatan perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 32.118.894.331,-** (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*). Rekapitulasi program, kegiatan perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut : (*Matriks Perubahan terlampir*);

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Murni Tahun 2023 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2023			Selisih		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
			4	5	6	7	8	9	10(9-6)	11	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3									12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,292,432,231		32,118,894,331		20,825,000,000		184.4%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,602,447,531		3,894,020,931		231,573,400		6.4%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Purwakarta	100%	19,857,900		19,857,900		-		0.0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.		Purwakarta	100%	9,963,900		9,963,900		-		0.0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta	100%	9,894,000		9,894,000		-		0.0%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Purwakarta	100%	1,774,030,370		1,774,030,370		-		0.0%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.		Purwakarta	100%	1,765,936,070		1,765,936,070		-		0.0%
	Administrasi Brang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Purwakarta	100%	8,094,300		8,094,300		-		0.0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Purwakarta	100%	6,323,400		6,323,400		-		0.0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta	100%	125,354,300		125,354,300		-		0.0%
	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Purwakarta	100%	68,800,000		68,800,000		-		0.0%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Purwakarta	100%	5,219,300		5,219,300		-		0.0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.		Purwakarta	100%	51,335,000		51,335,000		-		0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwakarta	100%	519,654,497		544,904,497		25,250,000		4.9%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Purwakarta	100%	46,498,000		46,498,000		-		0.0%
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor		Purwakarta	100%	29,998,600		29,998,600		-		0.0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Purwakarta	100%	129,763,897		155,013,897		25,250,000		19.5%
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan.		Purwakarta	100%	100,000,000		100,000,000		-		0.0%
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Purwakarta	100%	43,509,000		43,509,000		-		0.0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Purwakarta	100%	119,885,000		119,885,000		-		0.0%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Purwakarta	100%	50,000,000		50,000,000		-		0.0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Purwakarta	100%	329,426,700		529,426,700		200,000,000		60.7%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Purwakarta	100%	329,426,700		529,426,700		200,000,000		60.7%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		Purwakarta	100%	727,217,764		727,217,764		-		0.0%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Purwakarta	100%	20,000,000		20,000,000		-		0.0%

					Purwokarta	100%	99,511,000		0.0%	BAKESBANGPOL
Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwokarta	100%	99,511,000	Purwokarta	100%	99,511,000		0.0%	BAKESBANGPOL
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwokarta	100%	530,997,200	Purwokarta	100%	761,747,200	280,750,000	43.5%	BAKESBANGPOL
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Purwokarta	100%	495,789,500	Purwokarta	100%	564,789,500	69,000,000	13.9%	BAKESBANGPOL



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang dimulai September 2023 s/d 31 Desember 2023 meliputi Program dan Kegiatan yang didalamnya menggambarkan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja Anggaran.

Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih baik atas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**.

Purwakarta, 10 Agustus 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA



YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si

NIP. 19700102 199810 1 001